



Pekerja Rumah Tangga Perlu Sekolah

Dibutuhkan Lembaga yang Menjadi Fasilitator

YOGYAKARTA, KOMPAS – Para pekerja rumah tangga hendaknya mengenyam pendidikan, pelatihan, atau disekolahkan lebih dulu sebelum memasuki dunia kerja. Upaya tersebut sangat penting untuk menaikkan *bargaining position* para tenaga kerja.

Nasib pekerja rumah tangga (PRT) dianggap kurang menguntungkan karena masih adanya pemikiran dan cara pandang keliru dari majikan dan masyarakat umum. Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Yogyakarta Diah Suminar mengatakan dari 13.000 keluarga yang menjadi kader PKK di Kota Yogyakarta, 10 persen di antaranya menggunakan jasa PRT. Perilaku yang dialami PRT—selama ini—berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Jumlah PRT di Provinsi DIY berdasarkan data tahun 2002 mencapai sekitar 39.000 orang. Dari jumlah tersebut, lebih kurang 7.000 di antaranya berada di wilayah Kota Yogyakarta.

"*Bargaining position* menyang-

kut PRT harus terus ditingkatkan karena hal itu terkait dengan apa yang akan mereka peroleh, misalnya menyangkut besar gaji," ujar Diah yang menjadi pembicara pada Sarasehan dan Buka Bersama dalam rangka Gerakan Bersama Mewujudkan Kesejahteraan PRT di Pendapa Taman Siswa, Sabtu (20/9) petang.

Memfasilitasi

Menuntut adanya regulasi atau peraturan daerah yang menangani masalah PRT memang perlu dan harus diupayakan. Namun, menurut Diah, yang lebih penting lagi adalah bagaimana mewujudkan sebuah lembaga yang mampu memfasilitasi kebutuhan para PRT. Lembaga yang bisa memberikan pendidikan, keterampilan, dan bekal lainnya, termasuk advokasi.

Di Yogyakarta, salah satu lembaga yang menangani masalah ini adalah Rumpun Tjut Nyak Dien (RT-ND).

"Selain disekolahkan, janganlah PRT datang sendiri untuk mencari kerja. Jangan sampai ada ketidakjelasan identitas dan kualitas yang dimiliki PRT. Syukur, apabila mereka ternyata memiliki sertifikat siap kerja," ujar perempuan yang juga menjadi istri Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto itu.

Dikatakan Diah, kondisi ekonomi yang serba sulit menuntut kepala rumah tangga dan istri untuk bekerja keluar rumah. Untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mereka perlu bantuan seorang PRT. Sayangnya, tidak semua dari mereka sadar bahwa PRT memiliki kontribusi besar pada keluarga.

Nono Karsono, Koordinator Divisi Kajian dan Pendidikan Publik RTND mengatakan sosialisasi terhadap hak dasar PRT sebagai pekerja rumah tangga sangat diperlukan, termasuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan penyadaran bahwa mereka bukanlah seorang pembantu. (WER)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005